



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU**

Jln.Pasar Baru Pangkalan. KodePos 26272

Nomor : 900/ /C-PKL/2022 Pangkalan, 17 Januari 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
Perihal : ***Bahan LKPJ Kepala Daerah*** Yth. Bapak Bupati Lima Puluh Kota
dan LPPD Tahun 2020 Cq. Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan
di
Sarilamak

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor :130.4/519/PEM/XII-2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Permintaan Bahan Penyusunan LPPD dan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021, maka bersama ini kami kirimkan bahan LPPD Bupati dan LKPJ dari Kecamatan Pangkalan Koto Baru (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

ZULKIFLI LUBIS. S.Pd

NIP.19640720 200012 1 001

FORMAT A

OPD : KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Rincian kegiatan yang disertai narasi yang memuat sebagai berikut :

1. Nama Program dan Kegiatan
2. Sumber Anggaran (APBD) pada narasi Awal
3. Alokasi Anggaran (Rp 1.583.339.109)
4. Realisasi Kegiatan :
 - a. Realisasi keuangan Rp. 1.550.584.709 (97,93%)
 - b. Realisasi fisik 100 %
5. Keluaran (output) kegiatan
6. Capaian Kinerja
7. Permasalahan
8. Solusi kalau ada

KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

A. Program dan Kegiatan

Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan OPD pelaksana urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan dengan melaksanakan 5 Program, 13 Kegiatan dan 32 sub kegiatan urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan Rincian program dan kegiatan, alokasi dan realisasi pada APBD 2021 penyelenggaraan program dan kegiatan urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	1.583.339.109	1.550.584.709
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.420.462.809	1.391.122.709
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.084.400	20.516.000
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.237.200	3.170.000
7.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.384.800	1.245.000
7.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.298.000	1.848.000
7.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.791.800	3.665.000
7.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.605.400	2.172.000
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.767.200	8.416.000

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.198.735.109	1.186.174.807
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.186.871.009	1.175.222.807
7.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.500.900	5.468.000
7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.363.200	5.484.000
7.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.148.000	1.980.000
7.01.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.148.000	1.980.000
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.513.500	3.503.000
7.01.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.513.500	3.503.000
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.261.500	51.868.500
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	534.000	534.000
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	15.000.000
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.327.900	6.323.500
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.936.600	4.936.000
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat	26.463.000	25.075.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.119.000	21.291.000
7.01.01.2.07	Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.130.000	10.130.000
7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	10.130.000	10.130.000
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.615.300	63.444.252
7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	980.000	814.000
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	16.045.000	12.540.752
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.590.300	50.089.500
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.975.000	53.506.150
7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.945.000	51.476.150
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.030.000	2.030.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.708.600	50.698.000
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.157.000	5.152.000
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.157.000	5.152.000
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	45.551.600	45.546.000
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.551.600	45.546.000

7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.119.000	21.291.000
7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.899.000	9.076.000
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.220.000	12.215.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.621.000	2.620.000
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.621.000	2.620.000
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.621.000	2.620.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	87.427.700	84.853.000
7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi , Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	87.427.700	84.853.000
7.01.06.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.504.000	10.393.000
7.01.06.2.01.11	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.382.700	27.372.000
7.01.06.2.01.13	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11.165.100	11.150.000
7.01.06.2.01.17	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.521.000	7.410.000
7.01.06.2.01.18	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	28.854.900	28.528.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru ini sebagai berikut :

I. PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.237.200,- dan realisasi keuangan Rp. 3.170.000,- atau 97,92%. dengan realisasi fisik mencapai 97.92%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa RENSTRA, RENJA.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.384.800,- dan realisasi keuangan Rp. 1.245.000,- atau 89,90%. dengan realisasi fisik mencapai 89,90%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa RKA.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.298.000,- dan realisasi keuangan Rp. 1.848.000,- atau 80,41%. dengan realisasi fisik mencapai 80,41%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa PERUBAHAN RKA.
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.791.800,- dan realisasi keuangan Rp. 3.665.000,- atau 63,27%. dengan realisasi fisik mencapai 63,27%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa DPA.
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.605.400,- dan realisasi keuangan Rp. 2.172.000,- atau 83,36%. dengan realisasi fisik mencapai 83,36%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa PERUBAHAN DPA.
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.767.200,- dan realisasi keuangan Rp. 8.416.000,- atau 95,99%. dengan realisasi fisik mencapai 95,99%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa LKJIP, LKPJ LPPD, SPIP, SAKIP dan LAKIP.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.186.871.009,- dan realisasi keuangan Rp. 1.175.222.807,- atau 99,01%. dengan realisasi fisik mencapai 99,01%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa Honor Pengelola Keuangan, Pembayaran Gaji dan Tambahan penghasilan PNS.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.500.900,- dan realisasi keuangan Rp. 5.468.000,- atau 99,40%. dengan realisasi fisik mencapai 99,40%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa Jumlah Dokumen SPJ.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.363.200,- dan realisasi keuangan Rp. 5.484.000,- atau 86,18%. dengan realisasi fisik mencapai 86,18%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa Laporan Keuangan.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.148.000,- dan realisasi keuangan Rp. 1.980.000,- atau 92,17%. dengan realisasi fisik mencapai 92,17%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah , Penyusunan RKBMD, RKPBM, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD.
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.513.500,- dan realisasi keuangan Rp. 3.503.000,- atau 99,70%. dengan realisasi fisik mencapai 99,70%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa DUK, Karis, Karsu, Taspen, NPWP, Rekomendasi TPP dan SKP.
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 534.000,- dan realisasi keuangan Rp. 534.000,- atau 100,00%. dengan realisasi fisik mencapai 100,00%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 15.000.000,- atau 100,00%. dengan realisasi fisik mencapai 100,00%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa Komputer, Printer, Laptop, AC, Komputer, Televisi dan Infokus.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.327.900,- dan realisasi keuangan Rp. 6.323.500,- atau 99,93%. dengan realisasi fisik

mencapai 99,93%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa Kebutuhan Alat Tulis Kantor.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.936.600,- dan realisasi keuangan Rp. 4.936.000,- atau 99,98%. dengan realisasi fisik mencapai 99,98%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Barang Cetak dan Foto Copy.
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.463.000,- dan realisasi keuangan Rp. 25.075.000,- atau 94,75%. dengan realisasi fisik mencapai 94,75%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub Kegiatan Pengadaan mebel yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.130.000,- dan realisasi keuangan Rp. 10.130.000,- atau 100,00% dengan realisasi fisik mencapai 100,00%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian berupa terlaksananya pengadaan mebel kantor.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 980.000,- dan realisasi keuangan Rp. 814.000,- atau 83,06%. dengan realisasi fisik mencapai 83,06%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa Materai.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.045.000,- dan realisasi keuangan Rp. 12.540.752,- atau 78,15%. dengan realisasi fisik mencapai 78,15%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa Pelaksanaan pembayaran tagihan rekening Telepon, Air, Listrik dan Surat Kabar Kantor.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.590.300,-

dan realisasi keuangan Rp. 50.089.500,- atau 91,75%. dengan realisasi fisik mencapai 91,75%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa Peralatan Kebersihan dan Honor Tenaga kebersihan, dan tenaga Kontrak.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.945.000,- dan realisasi keuangan Rp. 51.476.150,- atau 93,68%. dengan realisasi fisik mencapai 93,68%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.030.000,- dan realisasi keuangan Rp. 2.030.000,- atau 100,00%. dengan realisasi fisik mencapai 100,00%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa Perbaikan Printer, Komputer, Laptop, AC, Infokus dan Televisi.

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.157.000,- dan realisasi keuangan Rp. 5.152.000,- atau 99,90%. dengan realisasi fisik mencapai 99,90%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja berupa Lomba Nagari dan Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Nagari.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan.
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.551.600,- dan realisasi

keuangan Rp. 45.546.000,- atau 99,98%. dengan realisasi fisik mencapai 99,98%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja berupa Pelaksanaan PATEN dan honor tenaga kontrak.

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa di Wilayah Kecamatan yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.899.000,- dan realisasi keuangan Rp. 9.076.000,- atau 91,68%. dengan realisasi fisik mencapai 91,68%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan dengan capaian kinerja berupa Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.220.000,- dan realisasi keuangan Rp. 12.215.000,- atau 99,95%. dengan realisasi fisik mencapai 99,95%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan dengan capaian kinerja berupa Monitoring, Pembinaan ke Nagari, Kegiatan Baliak Basurau dan Kegiatan Keagamaan serta Pembinaan Kelembagaan.

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.621.000,- dan realisasi keuangan Rp. 2.620.000,- atau 99,96%. dengan realisasi fisik mencapai 99,96%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja berupa Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan Pembinaan Terpadu di Kecamatan.

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa .

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.504.000,- dan realisasi keuangan Rp. 10.393.000,- atau 98,94%. dengan realisasi fisik mencapai 98.94%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Nagari yang berkembang dan maju dengan capaian kinerja berupa LKPJ Nagari, Pembinaan ke Nagari, Rapat , Monitoring dan Evaluasi pembinaan ke Nagari dan terlaksananya Pemilihan Bamus masing-masing Nagari.
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.382.700,- dan realisasi keuangan Rp. 27.372.000,- atau 99,96%. dengan realisasi fisik mencapai 99.96%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja berupa Pelaksanaan monitoring, evaluasi , konsultasi dan koordinasi dan honor tenaga kontrak.
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Wilayah Kecamatan yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.165.100,- dan realisasi keuangan Rp. 11.150.000,- atau 99,86%. dengan realisasi fisik mencapai 99.86%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja berupa Pelaksanaan monitoring, evaluasi , konsultasi dan koordinasi.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah Kecamatan yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.521.000,- dan realisasi keuangan Rp. 7.410.000,- atau 77,82%. dengan realisasi fisik mencapai 77.82%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja berupa Pelaksanaan monitoring, evaluasi , konsultasi dan koordinasi.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan yang didanai melalui APBD 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.854.900,- dan realisasi keuangan Rp. 28.528.000,- atau 98,86%. dengan realisasi fisik mencapai 98.86%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja berupa Pelaksanaan monitoring, evaluasi , konsultasi dan koordinasi dan juga honor tenaga kontrak.

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pangkalan koto Baru, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2021 dengan Bupati Lima Puluh Kota dengan 4 (empat) Sasaran strategis dan 5

(Lima) Indikator Kinerja Utama yang mendukung Program dan Kegiatan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	50%

Program	Anggaran
1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1,420,462,809
2 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 50,708,600
3 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 22,119,000
4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 2,621,000
5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 87,427,700
JUMLAH	1,583,339,109

A. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REASLISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	Pemerintahan	Meningkat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat				
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra dan Renja	Terlaksananya Penyusunan Rens tra dan Renja		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	Terlaksananya Penyusunan RKA		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA Perubahan		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Terlaksananya Penyusunan DPA Kecamatan Pangkalan Koto Baru		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPA Perubahan	Terlaksananya Penyusunan DPA Perubahan		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian Kinerja	Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian Kinerja		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan	Terbayarnya Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan verifikasi Keuangan	Terlaksananya Penatausahaan dan verifikasi Keuangan SKPD		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan	Terlaksananya penyusunan Laporan		

						Keuangan akhir tahun		
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan BMD	Terlaksananya Penatausahaan BMD		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Data administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Administrasi Kepegawaian		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Barang listrik penerangan kantor	Tersedianya barang listrik penerangan kantor		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Terbayarnya Barang Cetak dan Penggandaan		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan dan Minum harian PNS peserta rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah	Terbayarnya Makan dan Minum harian PNS peserta rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel kantor	Terlaksananya pengadaan mebel kantor		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Matrai 10.000, matri 3.000,	Tersedianya matrai 10.000,		

					dan materai 6.000	matrei 3.000, dan materai 6.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Rutin pembayaran tagihan rekening air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening air dan listrik		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Tim pelaksana Kegiatan dan honor Jasa tenaga Operator komputer	Terbayarnya Honor Honor Tim pelaksana Kegiatan dan honor Jasa tenaga Operator komputer		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Gedung kantor Camat	Tersedianya pemeliharaan Peralatan Gedung kantor Camat		
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Adanya Pelayanan Prima	Terlaksananya Pelayanan Prima		
				Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				

				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Nagari yang meningkat partisipasi masyarakatnya	Persentase Nagari yang meningkat partisipasi masyarakatnya	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan masyarakat, PHBN dan pemberdayaan perangkat Nagari	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat, PHBN dan pemberdayaan perangkat Nagari	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rapat koordinasi tk Kecamatan	Terlaksananya rapat rapat koordinasi tk Kecamatan Pangkalan	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
				Kegiatan Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi administrasi pemeritahan Nagari	Terlaksananya fasilitasi administrasi pemeritahan Nagari	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi ketentraman dan Tibum	Terlaksananya Fasilitasi ketentraman dan Tibum	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi penyusunan RKP nagari	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan RKP Nagari	
				Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di	Pendampingan	Terlaksananya	

				Wilayahnya	nagari di kecamatan Pangkalan	pendampingan Nagari di Kecamatan Pangkalan		
				Sub Kegiatan Kooordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	Koordinasi Pembangunan Nagari dan honor jasa Tenaga Opeartor Komputer	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Nagari dan honor jasa Tenaga Opeartor Komputer		

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kewilayahan pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Alokasi anggaran sebesar Rp. **1.583.339.109,-** dengan realisasi keuangan Rp **1.550.584.709,-** cukup berimbang, secara umum realisasi fisik mencapai 100% dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Pangkalan, Januari 2022
CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

ZULKIFLI LUBIS, S.Pd
NIP. 19640720 200012 1 001

LAMPIRAN III.2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

KABUPATEN : LIMA PULUH KOTA

NAMA SKPD :KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KEWILAYAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, SEKRETARIAT DAN KECAMATAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	DATA PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 9 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 9 program	100 %	FC DPA SKPD : halaman muka (cover), halaman halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya DPA tsb
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari: 1. SOP ttg paten	Ada 1SOP	FC halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan tahapan-tahapan Prosedur, dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya SOP tsb
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	-	- FC halaman muka (cover), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tsb. - FC Daftar rincian yang menunjukkan Permen yang diterbitkan Kementerian teknis yang mengatur

¹ Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	DATA PENDUKUNG
								urusan yang ditangani
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 5 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	55.55%	- FC struktur organisasi SKPD
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 0.	tidak ada	FC Daftar rincian yang menunjukkan jabatan fungsional yang ada di SKPD pada bidang yang menangani urusan terkait
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 14 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil	- FC daftar pegawai/ Bezeeting SKPD
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.	20%	- FC daftar pegawai/ Bezeeting SKPD

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	DATA PENDUKUNG
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----- org. - pejabat yang ada, sebanyak ---- org. %	- FC daftar pegawai/ Bezeeting SKPD
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2020, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. .Renstra 2016 -2021 2. .Renja 2020 3. .RKA 2020 .	.3 jenis dokumen	- FC RENSTRA, RENJA dan RKA : halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya ketiga dokumen tsb
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang TIDAK diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 0 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9	0 %	- FC RENJA SKPD : halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya RENJA tsb
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.	88,88 %	- FC RKA SKPD : halaman muka (cover), halaman halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya RKA tsb

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	DATA PENDUKUNG
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.	88,88 %	- FC DPA SKPD : halaman muka (cover), halaman halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya DPA tsb
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 1.431.621.464 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 0	0 %	FC Laporan Keuangan SKPD
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.410.261.459	0 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 274.134.735	0. %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.410.261.459	0 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. .LRA	Ada sebanyak 3 jenis :	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	DATA PENDUKUNG
						3. Calk		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada	FC Daftar Ases SKPD
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 1.883.465.027	0 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana masyarakat partisipasi	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Kotak Pengaduan	Jumlah sebanyak 2 jenis.	FC atau bukti fisik yang menunjukkan fasilitas/ prasarana informasi tersebut.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang PATEN	Ada	FC cover laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait

